



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

KOMPETENSI APARATUR DESA DALAM PELAKSANAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI DESA PETAI BARU KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Anggi Tri Lestari¹, Sahri Muharam², Sarjan M³
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM.7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
email: anggitrilestari898@gmail.com¹, sahrimuharampku@gmail.com²,
sarjan.fadlan@gmail.com³

Abstract

Competency is the work ability of each individual which includes aspects of knowledge, skills and work attitudes that are in accordance with the expected standardization. This research was carried out in Petai Baru Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency. This research explains the competency of village officials in carrying out government administration in Petai Baru Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in this research is the competency of village officials in carrying out government administration in Petai Baru Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency. The technique for determining the sample that the researcher used was Purposive Sampling. Namely determining the sample with certain considerations, which are closely related to the research objectives. Nine people were selected as samples, namely the Village Head, Village Secretary, Head of Affairs, Section Head, Head of the District, and Staff. The data analysis used in this research is qualitative descriptive analysis, namely the data obtained will be discussed thoroughly based on the facts that occurred, then compared with concepts and theories that support the discussion of the problems in this research and then come to generally accepted conclusions. From the results of the research it can be concluded that the Competence of Village Apparatus in Petai Baru Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency is in the "Quite Good" category, which can be seen from the answers to interviews with informants. Therefore, the author hopes that village officials will further improve their competence so that the services provided will become even better.

Keywords: *Village Apparatus, Competence*

Abstrak

Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang di harapkan. Penelitian ini di laksanakan Di Desa Petai Baru Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menjelaskan bagaimanakah Kompetensi Aparatur Desa Dalam Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Di Desa Petai Baru Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kompetensi Aparatur Desa Dalam Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Di Desa Petai Baru Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik untuk penentuan sampel yang peneliti gunakan Purposive Sampling. Yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yang mempunyai sangkut paut yang erat dengan tujuan penelitian. Yang dipilih menjadi sampel berjumlah 9 orang, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kadus, dan Staff. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu data-data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi, kemudian dibandingkan dengan konsep maupun teori yang



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan kemudian mengalami kesimpulan yang berlaku umum. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Kompetensi Aparatur Desa Di Desa Petai Baru Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dalam katagori “Cukup Baik” dapat dilihat dari jawaban wawancara dengan informan. Oleh karena itu penulis mengharapkan para aparatur desa untuk lebih meningkatkan kompetensi agar pelayanan yang diberikan bertambah menjadi lebih baik lagi.

Kata Kunci : Kompetensi, Aparatur Desa

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa berfungsi sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur wilayahnya. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mengingat pemerintahan desa merupakan lapisan paling bawah dalam sistem pemerintahan Indonesia dan sangat penting bagi tercapainya upaya menuju pembangunan nasional yang menyeluruh, maka desa berfungsi sebagai sarana penyelenggaraan pemerintahan dan operasional pembangunan. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, serta penguatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, merupakan salah satu hal yang perlu diperkuat pada tingkat pemerintahan paling bawah.

Selain berperan sebagai penjaga perdamaian dan penjaga ketertiban di wilayah tersebut, pemerintah desa dan perwakilannya mengelola kelompok-kelompok besar yang merencanakan acara masyarakat, proyek pembangunan, dan operasional pemerintah. Mereka mempunyai peranan penting dalam menentukan apakah suatu unit pemerintah maju atau mundur. Oleh karena itu, perangkat desa perlu benar-benar kompeten untuk bekerja sama menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Aparat desa diharapkan bekerja keras dan bekerja semaksimal mungkin guna memperlancar pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan penyajian data dan informasi yang diperlukan.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, menyebutkan tugas dan fungsi aparatur desa yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kemudian membina kehidupan masyarakat desa dan membina perekonomian desa. Selanjutnya melaksanakan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, dan juga aparatur melaksanakan tugas yaitu menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi kegiatan sesuai dengan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat.

Menurut (Poernomo, 2022) Tanggung jawab aparat desa mencakup tugas pencatatan, asimilasi dan pelaksanaan arahan dan kebijakan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten, serta penerbitan laporan berkala mengenai kesejahteraan penduduk desa. Melaksanakan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

tindakan yang telah diputuskan oleh desa. pemberian beberapa izin, antara lain izin mendirikan bangunan, izin usaha, izin tinggal, dan izin keluar desa. Selanjutnya, berikan rincian seperti kesaksian pribadi, fakta dari laporan polisi, dan lain sebagainya.

Aparat desa harus mempunyai kompetensi dalam melaksanakan tugasnya, karena sistem pembangunan untuk pemerintahan desa yang berfungsi dengan baik harus mengutamakan pengembangan kompetensi yang seluas-luasnya.

Banyaknya tuntutan dan keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, seperti ketidakmampuan menangani peralatan teknologi dan kurangnya pengalaman di lapangan, menunjukkan rendahnya tingkat disiplin dan kompetensi aparatur pemerintah desa. Ketika warga ingin mengurus dokumen kependudukan, surat tanah, akta kelahiran, dan urusan terkait lainnya, mereka menghadapi berbagai keluhan. Hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain kapasitas aparatur pemerintah desa itu sendiri, seperti tingkat pendidikan formal, pelatihan dan keterampilan, pengalaman, serta sikap dalam menjalankan tugasnya yang masih kurang.

Meskipun pelatihan ini diperuntukkan bagi pemerintah, namun dapat dimengerti bahwa kemampuan aparat desa dalam menjalankan tugasnya—khususnya dalam mengumpulkan bahan dan informasi yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat—belum dijalankan dengan baik dan konsisten sesuai dengan ketentuan, administrasi umum, pelayanan administrasi kependudukan, dan administrasi lainnya. Desa ini cukup berkembang untuk menjalankan pemerintahan desa, termasuk memberikan pelatihan peningkatan kapasitas bagi otoritas desa di beberapa bidang, khususnya administrasi. Salah satu bidang tersebut adalah pelatihan administrasi desa. sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 47 Tahun 2015 Tentang administrasi pemerintahan desa, dan cukup banyak pelatihan lainnya. Namun isu-isu masalah yang terjadi kurangnya pelayanan administrasi yang diberikan.

Pelayanan administrasi yang diberikan oleh aparatur memerlukan waktu yang lama, karena terkadang aparatur yang mampu menggunakan komputer tidak berada di tempat. Hal ini karena disiplin aparatur yang kurang, serta terdapat beberapa aparatur desa tidak mampu menggunakan komputer. Kapasitas kompetensi yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan di lapangan. Diantaranya masih belum optimalnya aspek pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan desa, karena kedisiplinan yang kurang dan kapasitas kompetensi aparatur yang kurang baik membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak maksimal, kapasitas kompetensi aparatur yang kurang tersebut misalnya terdapat beberapa aparatur yang belum dapat menggunakan teknologi yang terus berkembang seperti mengoperasikan alat elektronik, kemudian kurangnya pengalaman aparatur pada bidangnya yang digeluti. Sehingga kapasitas kompetensi aparatur yang kurang juga mengakibatkan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa seperti administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan dan administrasi pembangunan kurang terlaksana dengan baik. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis mengangkat judul proposal ini dengan **“Kompetensi Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Di Desa Petai Baru Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”**.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Menurut (Khaidir, Ali, 2015) "Administrasi" mengacu pada proses pengelolaan, pengorganisasian, dan administrasi. Kesemuanya mempunyai arti keteraturan dan pengaturan sebab, yaitu tujuan penguasaan, pengelolaan, dan khususnya pengaturan, terbentuknya ketertiban dan penataan serta pengendalian dinamikanya, jika masing-masing makna dibubuhi pe dan akhiran sebuah.

Menurut (Alemina, 2020) Kata administratie (bahasa Belanda untuk "pekerjaan tertulis", "administrasi", atau "pekerjaan kesekretariatan") adalah sumber dari kata administrasi dalam definisi spesifiknya. Menerima, mencatat, mengumpulkan, mengorganisasikan, menyalin, mengirim, menyimpan, dan sebagainya semuanya terlibat dalam kegiatan ini.

Menurut (Alemina, 2020) Dalam definisi yang paling luas, administrasi adalah praktik berkolaborasi secara efektif dengan sejumlah orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi

Menurut (Edison, Imas, 2018) Struktur sosial yang sengaja direncanakan dengan batas-batas yang jelas dan beroperasi secara konsisten menuju tujuan bersama dikenal sebagai organisasi.

Menurut Siagian dalam (Arie, 2018) Organisasi didefinisikan sebagai asosiasi formal yang terdiri dari dua individu atau lebih yang bekerja sama dan terikat bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perkumpulan ini mempunyai kelompok atasan yang terdiri dari satu atau lebih individu, dan kelompok bawahan yang terdiri dari satu atau lebih individu.

Organisasi, secara umum, digambarkan sebagai sekelompok dua atau lebih individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah tempat atau lokasi di mana individu berkumpul dengan cara yang metodis, terarah, terkendali, terencana, dan rasional, memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia secara efisien, termasuk uang, persediaan, fasilitas, dan infrastruktur, untuk mencapai tujuan organisasi.

2.1.3 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut (Irmayani, 2021) Manajemen sumber daya manusia, atau disingkat HRM, adalah ilmu atau teknik mengelola peran dan hubungan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu dengan cara yang efisien dan efektif yang dapat digunakan secara ideal untuk memenuhi tujuan bersama dari bisnis, karyawan, dan masyarakat. maksimum. Landasan manajemen sumber daya manusia (SDM) adalah gagasan bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin atau sekadar sumber daya bagi perusahaan.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Menurut Simamora dalam (Irmayani, 2021) Penggunaan, pertumbuhan, evaluasi, pemberian layanan, dan pemrosesan individu karyawan dalam perusahaan atau tim dikenal sebagai manajemen sumber daya manusia. Selain itu, penerapan sistem perencanaan, penyiapan personel, pengembangan pegawai, pengelolaan karakter, penilaian kerja, kompensasi pegawai, dan hubungan kerja yang harmonis semuanya termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Setelah mendengarkan beberapa ahli, saya sampai pada kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu yang mengendalikan bagaimana karyawan berhubungan satu sama lain dan peran mereka dalam proses pengembangan, pemanfaatan, evaluasi, dan pemeliharaan sumber daya manusia organisasi. Untuk mencapai tingkat pemanfaatan yang diinginkan. yang terbaik.

2.1.4 Teori/Konsep Kompetensi

Menurut (Thamrin, 2022) Kata "kompetensi" mempunyai etimologi yang berasal dari kata bahasa Inggris "competency", yang berarti otoritas, keterampilan, dan kemampuan. Untuk meningkatkan kinerja dan membantu organisasi berhasil, seseorang harus memiliki kombinasi pengetahuan, kemampuan, dan kualitas pribadi yang menjadikan mereka kompeten.

Menurut (Edison, Imas, 2018) menunjukkan bahwa kompetensi kerja adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Menurut (Nyoto, 2019) Salah satu cara untuk mendefinisikan kompetensi adalah kapasitas untuk melakukan tugas atau fungsi. Kapasitas untuk membangun informasi dan keterampilan melalui pengalaman dan pendidikan, serta kemampuan untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai pribadi.

2.1.5 Teori/Konsep Pemerintahan Desa

Menurut (Khaidir, Ali, 2015) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang diakui dalam wilayah kabupaten yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengawasi kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul daerah dan adat istiadat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional. Gagasan ini mempunyai implikasi terhadap cara pengorganisasian struktur birokrasi dan pemerintahan.

Menurut (Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, 2018) Desa pada dasarnya adalah tingkat pemerintahan terendah di Indonesia. Gagasan mengenai desa sebagai suatu kesatuan sosial sangat beragam, terutama tergantung pada tujuan dan perspektif yang diterapkan terhadap desa. Kata "desa" dapat merujuk pada posisi politik dan sifat posisi tersebut dalam hubungannya dengan pihak atau kekuatan lawan, selain merupakan sebuah konsep tanpa konotasi politik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

2.1.6 Teori/Konsep Administrasi Perkantoran

Menurut (Apani, 2020) Selain berusaha agar pekerjaan berjalan lancar, administrasi perkantoran juga membantu dalam memberikan informasi manajemen agar pembangunan perkantoran dapat berjalan sesuai rencana.

Dengan demikian, secara teori administrasi/manajemen perkantoran merupakan serangkaian kegiatan operasional mulai dari perencanaan, pengorganisasian (pengaturan dan pengaturan), pengarahan (pemberian arahan dan pengarahan), pengawasan dan pengendalian (exercise control), hingga pelaksanaan pekerjaan secara teratur dan lancar. .

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, tingkat penjelasan deskriptif, dan metodologi penelitian survei. Populasi besar atau kecil boleh jadi dijadikan subjek penelitian survei, namun data yang diteliti adalah sampel yang diambil dari populasi tersebut dalam (Sugiyono, 2017).

Tanpa membandingkan variabel-variabel itu sendiri, metode penelitian deskriptif ini digunakan untuk memastikan ada tidaknya variabel bebas pada satu atau lebih variabel (disebut juga variabel berdiri sendiri atau variabel bebas) dalam (Sugiyono, 2017).

Metode penelitian kualitatif sangat menekankan pada analisis proses, yang bersumber dari proses berpikir induktif yang dihubungkan dengan dinamika hubungan antar peristiwa yang diamati dan selalu didukung oleh penalaran ilmiah. Tanpa data kuantitatif, penelitian kualitatif tidak ada gunanya; sebaliknya, hal ini menyoroti kedalaman pemikiran formal peneliti dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat. (Gunawan, 2015 : 80).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Kompetensi Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Di Desa Petai Baru Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data dan informasi yang diperoleh dari peneliti di lapangan disajikan, dengan materi yang disesuaikan dengan kerangka teori tim peneliti. Tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan selama penelitian.

Kompetensi Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Di Desa Petai Baru Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup baik, terlihatnya dengan cukup baiknya Pengetahuan aparatur desa dalam pelaksanaan administrasi



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

pemerintahan desa, Keahlian aparatur desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, Sikap aparatur desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Hal tersebut sesuai dengan keadaan yang terjadi di Desa Petai Baru bahwasannya Pengetahuan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Di Desa Petai Baru Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup baik, dari hasil wawancara informan menjelaskan aparatur desa Petai Baru memiliki pengetahuan yang cukup mendukung pekerjaan yang dilakukan, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan terlihat dengan aparatur desa Petai Baru memiliki pengetahuan yang cukup dalam mendukung pekerjaan untuk pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, dikarenakan aparatur desa Petai Baru yang minimal berpendidikan minimal SLTP, dan rata – rata berpendidikan SLTA dan beberapa berpendidikan Sarjana, sehingga pengetahuan aparatur desa sudah cukup baik untuk mendukung pekerjaan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan di desa Petai Baru ini, dikarenakan pemerintahan desa diisi oleh orang – orang yang berpendidikan dan memiliki pengetahuan untuk melaksanakan tugas dan juga fungsinya, hanya saja terkadang terdapat aparatur desa yang kurang disiplin.

2. Keahlian (*skill*)

Dapat di lihat bahwasannya hal tersebut sudah sesuai dengan keadaan yang terjadi di Desa Petai Baru. Yaitu Keahlian Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Petai Baru, adapun dari hasil wawancara dan juga observasi penulis dengan informan dilapangan dapat disimpulkan bahwasannya aparatur desa Petai Baru memiliki keahlian teknis yang cukup baik untuk dapat melaksanakan administrasi pemerintahan desa, dapat terlihat dari sumberdaya manusia yang dijadikan aparatur desa Petai Baru memiliki pendidikan yang cukup, walaupun tidak semua aparatur desa mempunyai keahlian teknis dikarenakan tidak mempelajarinya pada saat bersekolah, namun para aparatur desa yang belum memiliki keahlian teknis juga berusaha meningkatkan keahliannya dengan mengikuti pelatihan, dikarenakan pelatihan dapat meningkatkan keahlian para aparatur desa agar kinerja yang dilakukan menjadi lebih baik, dan pemerintahan desa selalu menganggarkan dana desa untuk peningkatan kapasitas aparatur desa, selain itu sejauh ini aparatur desa mampu melaksanakan tugas dan fungsinya, serta dapat melaksanakan administrasi pemerintahan desa dengan cukup baik. Menunjukkan kemampuan para aparatur desa dalam mengidentifikasi masalah juga dikatakan sudah cukup baik, dengan memberikan penyediaan pelayanan pengaduan jika memiliki masalah, dengan adanya penyediaan pelayanan pengaduan tersebut para aparatur desa dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi, hal tersebut membuat pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dapat berjalan menjadi lebih baik. Menunjukkan kemampuan aparatur desa dalam mencari solusi atas masalah yang timbul dalam pemerintahan desa sudah cukup baik, untuk mencari solusi atas suatu masalah para aparatur desa melakukan peninjauan secara langsung dan kemudian melakukan diskusi untuk musyawarah agar mendapatkan solusi yang terbaik, kegiatan tersebut menjadikan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa Petai Baru menjadi cukup baik, dan para aparatur desa dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, tentunya dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

3. Sikap (*attitude*)

Menurut keadaan yang terjadi di Desa Petai Baru hal tersebut sudah sesuai dengan pernyataan di atas, bahwasanya Sikap Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Petai Baru, dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwasannya cukup baiknya inisiatif para aparatur dalam membantu rekan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan menunjukkan cukup baiknya inisiatif yang dimiliki oleh para aparatur desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya, dimana para aparatur selalu saling membantu ketika telah menyelesaikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa. Pelayanan aparatur desa yang diberikan kepada masyarakat dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa sudah cukup baik, terlihat dengan inovasi yang ada pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan pelayanan melalui handphone, WhatsApp, dan bahkan mendatangi langsung kerumah para aparatur jika terdapat keperluan mendesak, hanya saja terkadang kurang disiplinnya para aparatur desa, dimana masih terlihat tidak semua aparatur berada di kantor desa ketika masih jam kerja berlangsung, meskipun para aparatur tidak selalu berada di kantor desa pada saat jam kerja berlangsung, tetapi menurut para aparatur desa tidak mengganggu proses pemerintahan desa, aparatur desa tetap mampu melaksanakan tugas dan fungsinya di pemerintahan desa. Dalam menanggapi keluhan-keluhan yang diberikan oleh masyarakat dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa sudah cukup baik, menurut observasi penulis dilapangan para aparatur desa selalu menerima keluhan-keluhan yang diberikan oleh masyarakat dengan baik, hal tersebut juga dapat dilihat bahwa pemerintahan desa selalu mengadakan rapat dengan Ketua RW dan Ketua RT untuk mendengarkan keluhan-keluhan yang diberikan dan juga untuk mengetahui masalah apa yang sedang terjadi di desa Petai Baru, dengan begitu membuat pelaksanaan dalam administrasi pemerintahan sudah cukup baik.

5. SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya Kompetensi Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Di Desa Petai Baru Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan dilapangan yang menunjukkan Kompetensi Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan sudah cukup baik, meskipun Kompetensi Aparatur Desa sudah cukup baik namun masih terdapat permasalahan disiplin aparatur desa, serta untuk meningkatkan Administrasi Pemerintahan perlu adanya keseriusan yang lebih lagi dalam mengikuti pelatihan, hal tersebut untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa khususnya tata Kelola administrasi pemerintahan desa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimah kasih yang tiada henti kepada kedua orang tua penulis Ayah dan Ibu serta saudara dan saudari penulis yang telah memberi semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

menimbah ilmu, ucapan terima kasih kepada ibuk Dr.Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, ibuk Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, bapak Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, bapak Sahri Muharam, S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing I penulis, bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II penulis, bapak dan ibuk dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta teman-teman seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alemina, Henuk.-Kacaribu. (2020). *Pengantar Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: CV Andi Offest.
- Apandi, Yulianti. Devi. (2020). *Administrasi Perkantoran dan Logistik*. Lampung: Pustaka Ali Imron.
- Arie, Ambarwati. (2018). *Perilaku dan Teori Organisasi*. Malang: Media Nusa Kreative.
- Edison, Imas, Dkk. (2018). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Irmayani, Ni. Wijaya. Dian. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Khaidir, Ali, Agung. Saputra. Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nyoto. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Poernomo, Abdul. dkk. (2022). *Prosiding Diseminasi Hasil Penelitian Dosen 2022 "Pariwisata Dalam Multi Perspektif."* Bali: UPT Penerbit dan Pencetas Universitas Jember.
- Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, Dkk. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Thamrin, Noor. (2022). *Monograf Motivasi dan Kompetensi Kinerja Karyawan pada PT Penascop Maritim Indonesia*. CV Azka Pustaka.

B. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Noomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Administrasi Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa